

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilkada atau Pemilihan Kepala daerah adalah pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejak diundangkannya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten-kabupaten tersebut kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014, terpilihlah para kepala daerah langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa juga disebut sebagai PILKADA, yang dipilih secara langsung umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan umum adalah wadah bagi masyarakat untuk memilih wakil masyarakat. Pemilu pada dasarnya sebuah proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu juga merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana seluruh warga masyarakat secara terbuka memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Melalui proses ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menitipkan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui berbagai pilihan politik yang dilakukan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas normatif, bahkan melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri dan hal inilah yang menjadikan partisipasi masyarakat terkait politik itu penting.

Partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari pengakuan sebuah pemerintahan dikarenakan suara yang diberikan oleh setiap individu merupakan keberhargaan dari proses bernegara dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberi dampak positif terhadap pengakuan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah secara serentak yang pertama kali

dilaksanakan di tahun 2015, partisipasi politik tidak hanya menggembirakan karena masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya tergolong cukup rendah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yakni sekitar 75,5 persen, tetapi, pada kenyataannya partisipasi politik pada umumnya hanya sekitar 64,23 persen (Yantu, 2021).

Partisipasi politik berbicara hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi atau pengakuan. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam kaitannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu roda pemerintahan. Dalam suatu pemilu seperti partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dilihat sebagai kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara (Arniti, 2020).

Alat ukur untuk melihat partisipasi warga negara, demokratisasi dan legitimasi rakyat Indonesia dapat dianggap salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik bisa dalam berbagai hal, terutama melalui aktivitas dan antusiasme (Partisipasi Politik) masyarakat untuk tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Ini termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Data resmi KPU Pusat telah mempublikasikan jumlah pemilih ini pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berfluktuasi.

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik pada

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan faktor penting pembentukan proses kepemimpinan dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah menjadi proses legitimasi kekuasaan bagi suatu daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga menjadi refleksi di dalam melihat bagaimana proses pemerintahan lokal. Sebab melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat akan memiliki kepala daerah yang definitif dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.

Walaupun pada pilkada di Tahun 2020, mengalami kendala disebabkan dengan adanya pandemi *covid-19* yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena itu pilkada mengalami penundaan hingga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sebelumnya direncanakan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan di bulan September tahun 2020. Maka dari itu, pemerintah akan tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi *covid-19* dengan mematuhi protokol kesehatan.



**Gambar 1.1 Kegiatan Kampanye pada Saat Pandemi Covid-19**

Alat ukur untuk menggelar pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid- 19 tidak mudah dibandingkan dengan pemilihan kepala eksekutif sebelumnya kondisi normal pada umumnya. Dalam kondisi normal dapat mengumpulkan banyak orang, tetapi selama pandemi, dia tidak bisa lagi

mengumpulkan banyak orang karena untuk menghindari keramaian untuk mengendalikan penyebaran virus. Dampak pandemi *Covid-19* kemungkinan akan mengurangi partisipasi politik karena kekhawatiran besar tentang penyebaran virus sehingga perihal ini bisa menjadi satu indikator penurunan partisipasi politik masyarakat.

Salah satu penyebab menurunnya jumlah partisipasi pemilu adalah masyarakat kehilangan harapan terhadap calon kepala daerah. Di benak masyarakat, sebagian besar calon ini lebih mementingkan diri sendiri dan aspek kredibilitasnya cenderung di bawah. Khusus untuk pemilih pemula, sebagian besar masih menganggap pemilu itu sulit sehingga banyak yang tidak memilih atau golput. Minimnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula menyulitkan mereka untuk memilih.

Agar partisipasi politik masyarakat tidak turun dalam pemilihan walikota makassar dan wakil walikota makassar, perlu adanya faktor dukungan partisipasi politik masyarakat seperti Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar serta peran partai politik serta masyarakat.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terkait dengan data pemilih sementara (DPS) itu didominasi oleh pemilih millenial atau yang maksimal berusia 30 tahun. Usia daftar pemilih sementara kota Makassar berdasarkan usia maksimal 30 tahun yaitu 218813 pemilih. Yaitu 110687 pemilih laki-laki dan 108126 pemilih perempuan.



Gambar 1.2 Usia Dps Pilwali Makassar Tahun 2020

(Sumber: <https://www.kpu.go.id>)

Partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 menjadi perhatian utama bagi para pemerhati politik di Indonesia. Generasi dikenal dengan gaya hidup modern, perkembangan teknologi informasi dan media sosial, serta kesadaran akan hak-hak politik, milenial dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan hasil Pilkada di kota Makassar. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih dalam mengenai latar belakang partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020.

Pandangan menarik ini dapat sangat relevan ketika dikaitkan dengan Kota Makassar, terutama karena Makassar adalah salah satu pusat perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia Timur. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Makassar menjadi tempat di mana semangat perubahan dan aspirasi baru, seperti yang tercermin dalam perilaku politik milenial, dapat ditemukan.

Di tengah era digital yang semakin merajalela, generasi milenial di

Makassar juga turut aktif menggunakan teknologi dan media sosial untuk terlibat dalam politik. Mereka tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi online, mengampanyekan isu-isu yang penting bagi mereka, dan mengorganisir gerakan sosial melalui platform daring.

Perilaku politik milenial di Makassar juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam gerakan sosial dan advokasi untuk isu-isu lokal yang relevan, seperti pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, dan lingkungan hidup. Mereka menuntut kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan kota.

Ketika mereka memasuki tempat pemilihan, milenial di Makassar juga mencari pemimpin yang tidak hanya berjanji, tetapi juga memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mereka menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada solusi konkret untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kota.

Perilaku politik milenial di Makassar adalah cerminan dari semangat dan aspirasi untuk membangun kota yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif mereka dalam politik dan masyarakat, mereka menjadi agen perubahan yang mendorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Namun, realitanya, banyak pemilih milenial di Kota Makassar keliru dalam memilih pilihannya dikarenakan pusat informasinya hanya berorientasi di media sosial saja. Meskipun media sosial memberikan akses yang luas terhadap informasi, namun seringkali terjadi penyebaran informasi yang tidak valid atau tendensius. Hal ini dapat memengaruhi persepsi dan keputusan politik mereka, kadang-kadang mengarah pada pilihan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta atau analisis mendalam.

Ketergantungan pada media sosial juga dapat mempersempit perspektif dan pembahasan isu politik, karena algoritma platform cenderung

menampilkan konten yang sesuai dengan kecenderungan dan preferensi pengguna. Ini dapat mengakibatkan kurangnya paparan terhadap pandangan yang berbeda atau analisis yang mendalam tentang isu-isu yang kompleks.

Dalam konteks ini, penting bagi pemilih milenial di Kota Makassar untuk mengembangkan literasi media yang kuat, memverifikasi informasi yang mereka terima, dan mencari sumber informasi yang beragam. Selain itu, partai politik dan kandidat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada pemilih, baik melalui platform media sosial maupun melalui kampanye konvensional dan program-program literasi politik.

Dengan demikian, sambil tetap memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berpartisipasi dalam politik, penting bagi pemilih milenial di Kota Makassar untuk menjaga kritisisme dan kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi politik, serta untuk mencari sumber informasi yang andal dan beragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan politik mereka didasarkan pada pengetahuan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi kota dan negara mereka.

Di usia ini juga, para pemilih milenial di Kota Makassar mudah terpengaruh *money politic* dalam menentukan pilihannya. Praktik *money politic*, di mana calon atau partai politik memberikan uang atau imbalan materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka, masih menjadi masalah serius dalam proses demokrasi di banyak daerah, termasuk Kota Makassar.

Para pemilih milenial, terutama yang mungkin masih dalam proses membangun karir dan keuangan mereka, rentan terhadap godaan uang atau imbalan materi lainnya dari kandidat atau partai politik. Hal ini dapat mengaburkan keputusan politik mereka dan menghasilkan dukungan yang tidak otentik atau berdasarkan pada pertimbangan yang salah.

Selain itu, praktik *money politic* juga dapat merusak proses demokrasi

secara keseluruhan dengan mengubah pemilihan umum menjadi transaksi komersial, di mana suara dipertukarkan dengan imbalan materi. Hal ini dapat mengurangi integritas pemilihan umum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi para pemilih milenial di Kota Makassar untuk tetap waspada terhadap praktik money politic dan memilih berdasarkan pada nilai-nilai, visi, dan rekam jejak kandidat atau partai politik, bukan pada imbalan materi yang ditawarkan. Selain itu, pihak berwenang dan lembaga pengawas pemilihan umum juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik money politic untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Pada proses partisipasi politik terdapat perilaku politik masyarakat khususnya di kota besar akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat berupa partisipasi dalam pemilihan dan sosialisasi serta komunikasi politik yang baik dari para calon. Bentuk sosialisasi dan komunikasi tersebut seperti visi dan misi dari calon serta program kerja yang akan dilaksanakan, dimana proses pelaksanaan sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan dari jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan berlangsung.

Hal tersebut seringkali dilakukan dan terjadi dengan berbagai cara bahkan banyak kita temukan dilapangan seperti banyak calon yang seringkali mengabaikan etika politik seperti adanya faktor teror dan politik uang. Pada umumnya dalam proses sosialisasi tersebut para calon memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat dan membawa pengaruh penting dalam proses kampanye, solid serta kompak bahkan bagi calon yang memiliki modal uang besar memiliki potensi dan peluang besar pula untuk memenangkan pemilihan. Biasanya seseorang yang mencalonkan sebagai kandidat memiliki pengaruh besar dan kuat secara politik maupun ekonomi di lingkungan masyarakatnya.

Lebih lanjut William G. Flanagan (2010) menjelaskan perilaku politik

adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik. Sedangkan, menurut (Haliim, 2017) perilaku politik masyarakat, behaviorsme memegang peranan penting dalam menjelaskan hubungan perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat dengan kondisi politik yang ada didaerahnya pula. Perilaku politik masyarakat terbentuk dengan berbagai cara, tetapi pengaruh besar tetap berasal dari lingkungannya. Hal ini di sebabkan konstruk perilaku dasar dari manusia masih mementingkan untung-rugi yang berimbis kedirinya. Untung-rugi yang dimaksud bukan hanya masalah materi semata, tetapi bagaimana harapan, ide, ataupun pencapaian mereka bisa tercapai atau tidak.

Dalam partisipasi politik ada juga beberapa faktor yang mendorong tingkat partisipasi, Selain media sosial, faktor lain yang membuat partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 adalah kepribadian dan karakteristik dari masing-masing pasangan calon. Pemilih milenial lebih memilih pasangan calon yang mampu menginspirasi dan memotivasi mereka untuk turut serta dalam proses politik. Kepribadian yang ramah, santun, dan menghargai perbedaan menjadi faktor penting dalam menarik perhatian pemilih milenial.

Faktor ketiga yang membuat partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 adalah pandemi *COVID-19*. Sejak awal pandemi, Indonesia telah melakukan sejumlah kebijakan pembatasan sosial yang signifikan, termasuk pembatasan kegiatan politik. Hal ini membuat kampanye politik yang dilakukan secara langsung menjadi sangat sulit. Pasangan calon yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi pandemi dan memaksimalkan penggunaan media digital untuk kampanye politik memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik perhatian pemilih milenial.

Partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar

tahun 2020 juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti tingkat pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan kesadaran akan hak-hak politik. Pemilih milenial yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya, serta memiliki kemampuan untuk memahami program-program yang diusung oleh para calon. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial juga dapat membantu memperluas wawasan dan pengalaman pemilih milenial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan politik mereka.

Tidak hanya itu, kesadaran akan hak-hak politik juga menjadi faktor penting dalam partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020. Pemilih milenial yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak politiknya, termasuk hak memilih dan dipilih, cenderung lebih aktif dalam proses politik dan memiliki keinginan untuk memilih calon yang sesuai dengan visi dan misi mereka.

Namun, partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, masih terdapat kendala- kendala yang dapat menghambat partisipasi politik mereka. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang proses politik dan program-program yang diusung oleh para calon. Hal ini dapat menyebabkan pemilih milenial merasa tidak tertarik atau tidak peduli terhadap proses politik.

Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi politik yang aktif dari pemilih milenial, terutama dalam bentuk kegiatan seperti pemilihan, debat publik, atau kampanye sukarela. Sebagian besar pemilih milenial cenderung lebih aktif di media sosial dan kurang aktif dalam kegiatan politik yang lebih formal, seperti rapat atau diskusi publik. Hal ini dapat menyebabkan partisipasi politik mereka menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi hasil Pilkada.

Kendala lainnya adalah polarisasi politik dan kecurangan dalam

proses politik. Pemilih milenial cenderung mencari informasi dari berbagai sumber dan memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik yang berkembang. Namun, polarisasi politik dan kecurangan dalam proses politik dapat mengaburkan fakta-fakta dan menghalangi pemilih milenial dalam memilih calon yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya yang lebih aktif dari para pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 dan di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkenalkan pemilih milenial pada proses politik yang akan datang yaitu melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, dan diskusi publik.

Proses politik harus mempunyai upaya yang besar sehingga menciptakan gambaran demokrasi yang baik. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik aktif dari pemilih milenial melalui kegiatan-kegiatan seperti debat publik, kampanye sukarela, dan pemilihan. Pemerintah dan LSM juga dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk pemilih milenial untuk memperoleh informasi terkait program-program yang diusung oleh para calon, baik melalui media sosial maupun media konvensional seperti televisi atau surat kabar.

Polarisasi politik dan kecurangan dalam proses politik dapat diatasi dengan memperkuat institusi-institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan proses politik. Pemilih milenial perlu diberikan kepercayaan bahwa proses politik dapat berlangsung secara adil dan transparan, sehingga mereka dapat memilih calon berdasarkan visi dan misi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Masyarakat sipil juga sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 dan masa depan. Masyarakat sipil dapat berperan dalam

memberikan edukasi politik kepada pemilih milenial, mengorganisir kegiatan-kegiatan politik yang dapat menarik minat pemilih milenial, serta membantu memperkuat institusi-institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan proses politik.

Menurut Irwanto (2019) yang meneliti strategi kampanye capres di pemilu 2019 terhadap generasi milenial, terdapat tiga karakteristik yang menjadi ciri unik sekaligus kendala para capres dalam menggaet pemilih golongan milenial:

1. Generasi milenial lebih dipahami sebagai kelompok yang homogen oleh tim kampanye tanpa pemahaman yang memadai mengenai perbedaan internal mereka dalam hal usia, jenis kelamin, kelas, dan lokasi geografis (perkotaan-pedesaan).
2. Strategi menarik generasi milenial cenderung terbatas pada perubahan dangkal pada penampilan kandidat. Meskipun cara-cara tersebut mungkin menarik perhatian media, cara-cara tersebut mungkin tidak akan berdampak jangka panjang terhadap para pemilih karena bersikap tidak tulus atau dibuat-buat.
3. Ketidaklayakan program yang diajukan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk menyapaikan program yang kurang mendukung sehingga kurang meyakinkan pemilih milenial. Sebab, masih minimnya pemahaman kaum milenial dan perilaku unik mereka sebagai pemilih strategis pada pemilu presiden mendatang. Masih harus dilihat apakah calon presiden di sisa hari mampu menarik generasi milenial ke tempat pemungutan suara.

Penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2020, pemilih milenial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pilkada dengan suaranya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih aktif dari berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih

milennial dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan proses politik yang lebih formal.

Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi politik pemilih milenial pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 dapat menjadi indikator penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik pemilih milenial yang meningkat dapat memperkuat sistem demokrasi dan memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar dan diakui dalam proses politik.

Pilkada kota Makassar tahun 2020 merupakan proses lanjutan dari pilkada yang pernah di gelar tahun 2018, dimana sebelumnya di ikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Nomor urut 1 Munafri Arifuddin dan Drg. Rachmatika Dewi; Nomor urut 2, yaitu Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari. Pada Saat proses pilkada kota Makassar tahun 2018 salah satu pasangan calon terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran sehingga PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) memerintahkan KPU kota Makassar duntuk mendiskualifikasi pasangan tersebut dalam kontestasi pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Momen politik pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 kembali berlanjut dengan di ikuti oleh 4 Pasang Calon dengan berbagai latar belakang. Momen politik pemilihan kepala daerah di kota Makassar kali ini sedikit berbeda di karenakan berlangsung di tengah pandemi *Covid-19* sehingga proses sosialisasi yang di lakukan oleh pasangan calon kepada masyarakat sangat terbatas dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga pasangan calon di tuntut untuk mengandalkan media sosial untuk melaksanakan kampanye atau memaparkan visi misi pasangan calon melalui media sosial sehingga dengan cara ini masyarakat dapat mengetahui informasi pasangan calon.

Daftar Pemilih Tetap di Pemilihan Wali Kota Makassar tahun

2020 berjumlah 901.087 pemilih, dan lebih dari 20 persennya merupakan pemilih yang termasuk ke dalam generasi millennial (Mirsan, 2020). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, LSM, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, pemilih milenial dapat merasa lebih terlibat dalam proses politik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa depan.

Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena kecamatan tallo kelurahan bunga eja beru dianggap bahwa partisipasi milenial yang sangat antusias pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang pada dasarnya pemuda yang berada di kelurahan bunga eja sangat identik dengan perilaku-perilaku yang negatif ataupun perilaku yang menyimpang sehingga inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi penelitian. Kelurahan Bunga Eja Beru menurut penulis di anggap sebagai salah satu kelurahan yang antusias millennial nya sangat tinggi ketika kampanye pasangan calon pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu

- a. Bagaimana perilaku politik pemilih millennial pada pikada kota makassar tahun2020?
- b. Bagaimana pilihan rasionalitas milenial dalam berperilaku politik?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perilaku politik pemilih millennial pada pikada kota makassartahun 2020
- b. Untuk menggambarkan pilihan rasionalitas milenial dalam berperilaku politik

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat diantaranya untuk:

a. Kegunaan Teoritis

- Memperluas kajian mengenai **partisipasi politik**, bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhinya.
- Menjadi **referensi akademik** bagi pengembangan model atau kerangka teori mengenai perilaku pemilih pada konteks pemilihan kepala daerah di era masyarakat digital.

b. Kegunaan Praktis

- Memberikan masukan bagi **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dalam merancang strategi sosialisasi dan edukasi pemilih yang lebih tepat sasaran bagi pemilih milenial.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi **partai politik dan tim pemenang** dalam menyusun pendekatan dan metode kampanye yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial.
- Memberikan informasi awal bagi **peneliti selanjutnya** sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait partisipasi politik generasi muda dalam pemilu/pilkada.

### 1.5. Teori Pilihan Rasional

Rational Change Theory (Teori Tindakan Rasional) menekankan pada tindakan perseorangan yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai. Pencetus teori tersebut, James S. Coleman (1926†1995) merupakan salah satu sosiolog paling terkemuka di paruh kedua abad kedua puluh. Dilahirkan pada tahun 1926, di Bedford, Indiana, lulus sebagai sarjana sains dari Universitas Purdue pada tahun 1949. Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan) (Sastrawati, 2019).

Teori pilihan rasional orientasinya kepada tindakan rasional individu, itu berarti bahwa fokus Coleman dari segi isu makro-mikro adalah pertautan makro ke mikro, atau bagaimana kombinasi tindakan-tindakan individu menghasilkan perilaku sistem. Meskipun dia memberi prioritas kepada isu itu, Coleman juga tertarik pada pertautan makro ke mikro atau bagaimana sistem itu membatasi orientasi para aktor. Akhirnya, dia menunjukkan dengan jelas suatu perhatian pada aspek mikro-makro hubungan itu, atau dampak tindakan-tindakan individu terhadap tindakan-tindakan individu yang lain (Ritzer, 2012).

Teori pilihan rasional dalam sosiologi mulai berkembang di dekade 1960-an. Salah satu tokoh utamanya adalah James Coleman yang mengajukan konsep tentang "kerangka tindakan bertujuan (*purposive action framework*). Coleman menggunakan model penjelasan tentang tindakan kolektif yang diperluas ke dalam analisisnya tentang norma sosial, perkawinan, sistem status, dan pendidikan. dalam pengembangan struktur umum model teori pilihan rasional, terdapat di dalamnya beberapa terma teoretis, yakni (1) setiap aktor berfungsi sebagai pemain dalam sistem; (2) alternatif-alternatif pilihan tersedia bagi setiap aktor; (3) sejumlah dampak mungkin terjadi di dalam sistem dari setiap tindakan aktor; (4) preferensi setiap aktor jumlahnya lebih dari dampak yang mungkin terjadi; (5) ekspektasi aktor berdasarkan parameter sistem (Upe, 2010).

Teori pilihan rasional Coleman memiliki dua unsur utama, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat kendalikan oleh aktor. Pemusatan perhatian pada tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku sistem sosial. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang.

Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan (Stoker, 2021).

Aktor dalam melakukan tindakan, tentu diawali seleksi terhadap pilihan yang tersedia atau memungkinkan dengan memerhatikan segala aspek seperti tujuan apa yang menjadi prioritasnya, sumber daya yang dimiliki dan juga kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukannya. Seorang aktor dapat saja memilih untuk tidak mengejar tujuan yang paling bernilai oleh karena mungkin sumber daya yang dimilikinya tidak mencukupi, kemungkinan keberhasilannya kecil, atau mungkin justru akan membahayakan tujuan-tujuan lain yang diinginkannya. Dengan demikian, aktor dipandang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mereka (Jones, 2016)

Teori pilihan rasional menurut sosiolog, menyatakan bahwa setiap orang, ketika memiliki tindakan yang telah dipengaruhi oleh norma-norma rasial, memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teori pilihan rasional, pilihan, keyakinan, dan tindakan semuanya memiliki satu hubungan penghubung lainnya. Jika tindakan memiliki hubungan dengan rencana dan ide batu kunci, itu akan dicirikan sebagai rasional (Rifai, 2015).

Pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai semua kapasitas rasional, waktu, dan keterikatan emosi yang penting untuk memilih arah tindakan terbaik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Masalah paling sederhana secara konseptual adalah pembuatan-keputusan parametrik dalam kepastian ketika setiap tindakan mempunyai hasil yang diketahui (tidak ada risiko atau ketidakpastian) dan hubungan antara aksi dan akibat tak dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Sehingga, mereka bisa diperlakukan sebagai parameter yang tetap dengan Individu diasumsikan mampu menilai hasil ataupun aksi (Upe, 2010).

Prinsip utama dari perspektif rasional bahwa, tergantung pada keadaan, tindakan dapat mengarah pada berbagai hasil sementara orang tidak menyadari konsekuensi potensial. Terungkap bahwa setelah memiliki asumsi tertentu, orang mulai percaya bahwa semua orang memiliki asumsi yang sama dan bekerja untuk memaksimalkan manfaat mereka dengan menyeimbangkan semua kemungkinan hasil dari tindakan mereka dengan kemungkinan bahwa mereka benar-benar akan terjadi. Manfaat yang dibutuhkan untuk mewakili pembuatan keputusan di sini dapat diperoleh, setidaknya secara prinsip, dari pengalaman di mana individu memilih di antara pilihan hasil dan dapat ditafsirkan mengandung informasi tentang sikap individu terhadap pilihan rasional (Rifai, 2015).

Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional. Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, atau bagaimana cara hubungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial (Upe, 2010).

#### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan riset-riset ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai literasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Riset terdahulu ini penting untuk melihat perilaku politik pemilih milenial dalam pilkada kota Makassar tahun 2020. Tabel berikut menyajikan penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjang penelitian yang rencananya dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

**Tabel 1.2.** Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis          | Judul Penelitian                                                                                                                                               | Metode                     | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Amrin,<br>(2016) | Perilaku Politik<br>Kaum Muda<br>Dalam<br>Pemilihan<br>Legislatif di<br>Desa Rato<br>Kecamatan<br>Lambu<br>Kabupaten<br>Bima Tahun<br>2014                     | Kuantitatif<br>Deskriptif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkapkan serta menggambarkan perilaku politik kaum muda di salah satu desa di kabupaten Bima pada tahun 2014</li> <li>• Meunjukkan pilihan politik kaum muda dan berpartisipasi dalam proses sosialisasi politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik di sebabkan oleh faktor, proses sosialisasi politik, faktor figur, faktor kultur, faktor kekuasaan dan ekonomi.</li> </ul>                              |
| 2.  | Pratama,<br>2019 | Perilaku Politik<br>Pemilih Pemula<br>dalam Pemilihan<br>Presiden Tahun<br>2019 di<br>Kabupaten<br>Soppeng (Studi<br>Kasus di Smk<br>Negeri 3<br>Watansoppeng) | Deskriptif<br>Kualitatif   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku politik pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis seperti, latar belakang demografi, sosial dan ekonomi.</li> <li>• Bisa saja pemilih pemula untuk memilih dengan mengikuti pendekatan psikologis sosial, akan tetapi tergantung oleh kinerja partai serta pendekatan rasional yang dimiliki oleh pemilih tersebut.</li> <li>• Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya</li> </ul> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>dorongan serta arahan dari orang tua untuk menentukan pilihan dengan berdasarkan visi misi pasangan calon.</p> <p>Faktor pengambat penelitian ini yaitu adanya berita hoax seperti berita yang mengadu domba</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil penelitian diatas, memiliki kesimpulan yang berbeda dengan topik penelitian perilaku politik. Penelitian yang dilakukan oleh Amrin [2016] membahas terkait perilaku politik pemilih muda dalam pemilihan legislatif, dan hasilnya antara lain, menunjukkaPeneliti mendapatkan ada beberapa hasil penelitian seperti yang dicantumkan pada tabel di atas yang mengkaji tentang perilaku politik. Pertama, armin mencoba meneliti terkait perilaku politik pemuda desa yang dalam penelitian kali ini memiliki perbedaan karena akan merujuk pada pemilih pemula perkotaan, khususnya Kota Makassar di kecamatan Tallo, Kelurahan Bunga Eja Beru. Penelitian ini mirip dengan alat analisis dari peneliti pratama yang menggunakan pendekatan psikologis atau afektif dan juga pendekatan sosiologis atau nilai, dan juga dalam penelitian yang akan dilaksanakan menambahkan pendekatan rasional. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh afianty juga memiliki kesamaan untuk melihat perilaku politik, tetapi penelitian yang dilakukannya selain tidak merujuk pada pemilih milenial, juga periode pilkada walikota makasssar berbeda secara waktu. Sehingga, penting untuk melihat bagaimana perilaku politik pemilih milenial pada pilkada walikota makassar pada tahun 2020, selain sebagai pembanding dari penelitian sebelumnya, juga dapat menjadi bahan referensi baik kepada

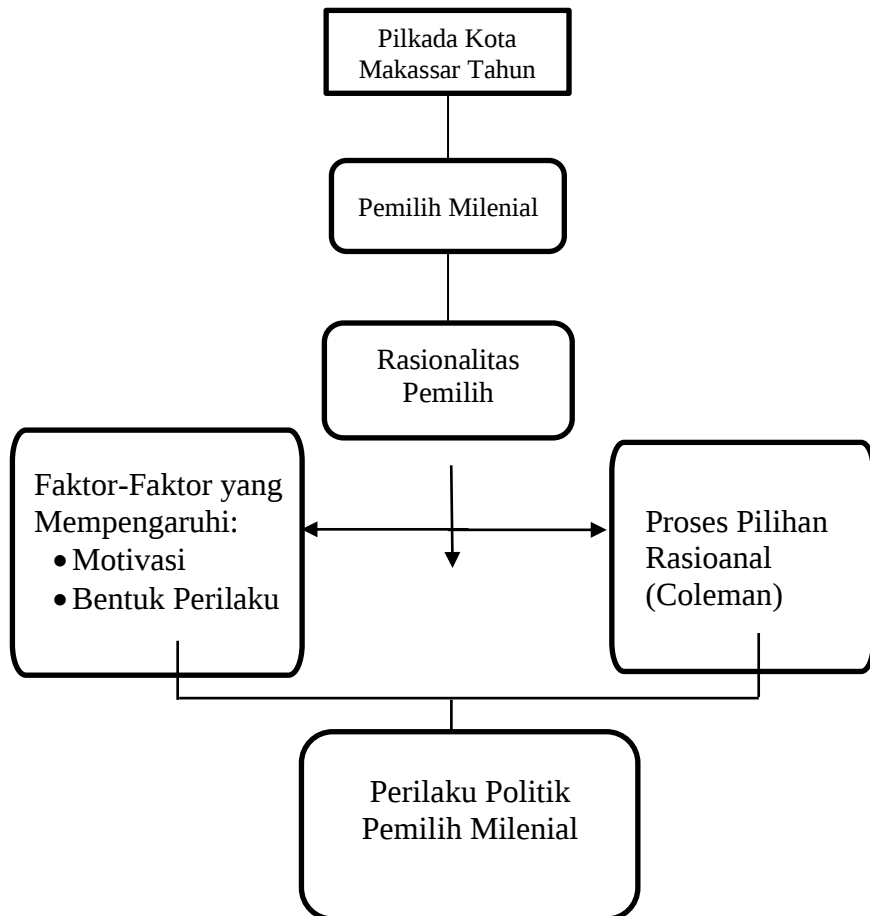
pihak pelaksana maupun partai politik yang memiliki kepentingan di dalam memetakan suara pemilih millennial di periode yang akan datang.

#### **1.7. Kerangka Pikir**

Pilkada kota makassar tahun 2020 menjadi sebuah momen untuk menentukan pemimpin bahkan nasib kota makassar dalam 5 tahun kedepan yang dikemas dalam pemilihan kepala daerah kota makassar tahun 2020. Dalam data resmi dari penyelenggara pemilu yakni komisi pemilihan umum kota makassar jumlah pemilih millennial dikatakan mendominasi jumlah pemilih di pilkada kota makassar tahun 2020 tersebut.

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bentuk perilaku politik dari pemilih millennial makassar dan juga ingin melihat bentuk pilihan rasional dari pemilih millennial kota makassar pada pilkada kota makassar tahun 2020, untuk melihat bentuk perilaku pemilih millennial dan juga bentuk pilihan rasional millennial makassar dalam pilkada kota makassar tahun 2020 tersebut, penulis menggunakan teori pilihan rasional sebagai dasar berpikir dan alat analisi terhadap penelitian ini.

Dalam melihat pilkada kota Makassar ini khususnya perilaku millennial Makassar dalam pilkada kota Makassar tahun 2020 penulis fokusnya kepada aktor dan sumber daya dari teori pilihan rasional, dimana aktor ini digambarkan sebagai millennial dan sumber daya yang dimaksud ini adalah kemampuan yang di miliki oleh millennial tersebut.



## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis) yang mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Siyoto, 2015). Sedangkan, menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk fisik, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Ahyar et al., 2020). Dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus (case study). Studi kasus merupakan teknik rancangan penelitian yang mencakup penelitian individu, lembaga, dan masyarakat yang mengkaji secara intensif mengenai unit sosial (Ahyar et al., 2020).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif pada riset ini dianggap selaras oleh peneliti dalam upaya mengungkapkan informasi-informasi yang sifatnya detail dan terperinci dalam melihat perilaku politik pemilih millennial pada pikada kota makassar tahun 2020. Adapun hasil dari informasi yang diperoleh, peneliti akan berupaya untuk menyajikan data dengan

menggambarkan secara sistematis perilaku politik pemilih millenial pada pikada kota makassar, mengetahui bentuk efek media terhadap partisipasi pemilih millenial dalam pilkada kota makassar tahun 2020

## **2.2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

**Tabel 1.1.** Waktu dan Kegiatan Penelitian

| No. | Kegiatan                     | Desember 2023 | Januari -Maret 2024 | April-Desember 2024 | Januari -Juni 2025 | Juli 2025 |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1.  | Penyusunan Proposal          |               |                     |                     |                    |           |
| 2.  | Seminar Proposal             |               |                     |                     |                    |           |
| 3.  | Pengurusan izin penelitian   |               |                     |                     |                    |           |
| 4.  | Obeservasi Lokasi Penelitian |               |                     |                     |                    |           |
| 5.  | Penentuan Informan           |               |                     |                     |                    |           |
| 6.  | Pengumpulan Data             |               |                     |                     |                    |           |
| 7.  | Pengelolaan Data             |               |                     |                     |                    |           |
| 8.  | Pengerjaan hasil laporan     |               |                     |                     |                    |           |
| 9.  | Bimbingan Laporan            |               |                     |                     |                    |           |
| 10. | Seminar Hasil Penelitian     |               |                     |                     |                    |           |

Adapun waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2024. Diawali dengan observasi awal peneliti melalui pertemanan media sosial, wawancara, dan sampai pada pengeolahan

data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena, observasi awal peneliti melalui pengamatan dan pengalaman peneliti waktu ikut dalam sosialisasi partisipasi politik yang dilaksanakan partai politik di kelurahan bunga eja, sehingga hal ini juga sudah memberikan gambaran awal terhadap peneliti. Adapun jadwal waktu penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu alasan peneliti memilih kelurahan Bunga Eja Beru karena peneliti pernah aktif melakukan kegiatan sosialisasi politik pada Pilkada Kota Makassar di beberapa Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar, hanya di kelurahan Bunga Eja Beru yang menurut penulis Millenial nya aktif dan berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi pasangan calon pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020.

### **2.3. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan.

Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

Observasi dan wawancara memerlukan data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana

banjir yang sering terjadi di Perumnas Antang Blok 10. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data sekunder, daftar nama Perempuan yang terlibat dalam penanggulangan pasca banjir di Jalan Suling perumnas antang blok 10, serta foto-foto kegiatan saat melaksanakan penanggulangan pasca banjir tersebut.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai suatu obyek yang nantinya akan digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik selama proses penelitian berjalan. (Sakaria, et.al, 2022). Menurut Sakaria, penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif dengan menggunakan skala pengukuran data nominal (data kategori) dan ordinal (kategori yang berjenjang).

Berdasarkan sumbernya, ada dua data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah berbagai informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian secara langsung oleh peneliti dengan melalui observasi atau melalui responden sebagai sumber pertama. Data sekunder adalah berbagai informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung melalui sumber pertama (responden), melainkan peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah diperoleh oleh pihak lain. (Martono, 2016)

Dalam mengumpulkan data, ada tiga teknik pengumpulan yang akan digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi:

##### **1. Wawancara.**

Arikunto (dalam Samsu, 2017) mendefinisikan wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberikan informasi dengan menggunakan daftar wawancara. Daftar wawancara ini biasanya di

instrumen pengumpulan data (IPD). Wawancara ini dipakai untuk lebih mendalami data yang diperoleh dari observasi. Adapun informan yang dipilih oleh penulis dalam melengkapi data penelitian ini adalah para pemilik toko, karyawan hingga pembeli (konsumen) ataupun (Pengecer).

## 2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Prastowo, 2010), observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini sering juga disebut sebagai metode pengamatan di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan pengamatan langsung terhadap objek tertentu di lapangan.. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui kondisi pedagang konvensional dalam mempertahankan dan menghadapi perkembangan online shop.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel- variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia hingga akan relative murah pengeluaran, biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.

## **2.5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun beberapa komponen dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman menurut Sugiyono (2013), yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul, perlu adanya upaya untuk mereduksi data yang dikumpul di lapangan sebab bisa jadi jumlah data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak. Menurut Sugiyono (2019) mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Lebih lanjut Sugiyono juga menjelaskan bahwa reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Selain itu reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga data mereduksi data- data yang memiliki nilai temuan dan perkembangan teori yang signifikan.

## 2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data terhadap data-data yang didapatkan dari lapangan, peneliti kemudian melakukan penyajian data/display data. Dalam penyajian data kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Namun, menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Tujuan melakukan display data, adalah agar peneliti yang melakukan penelitian lebih muda untuk memahami apa yang terjadi. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Mile dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) bahwa dalam penelitian kualitatif, mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Sugiyono (2013), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan berikutnya. Namun, jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan suatu kesimpulan yang kredibel.

Lebih lanjut Sugiyono (2019) menerangkan bahwa, dengan demikian, dalam penelitian kualitatif mungkin untuk menjawab

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan